

## Caleg Belum Pahami Pembangunan dan Lingkungan



Rubrik ini Kerja Sama  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Unika Soegijapranata Semarang

PESTA demokrasi lima tahunan sudah tiba. Para calon anggota legislatif (Caleg) dan partai politik (Partai) diberi kesempatan melakukan kampanye dalam menyampaikan visi dan misi yang akan dilakukan demi perubahan kemajuan bangsa ini. Mereka beramai-ramai dan berupaya merebut simpati rakyat agar memilihnya, sehingga dapat

melenggang ke Senayan ataupun menjadi para wakil di daerah.

Khalisah Khalid dalam tulisannya di *Kompas*, 29 Maret 2014 selaku Kepala Departemen Jaringan dan Pengembangan Sumber Daya Walhi, menyatakan bahwa hanya 7 persen dari para caleg DPR yang mempunyai kapasitas, komitmen dan integritas

yang baik dalam memahami persoalan lingkungan dan juga persoalan tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Khalisah, terlihat bahwa para calon pemimpin bangsa ini belum sepenuhnya memahami hubungan antara lingkungan dan pembangunan. ▶ Baca *Caleg ...* hal 4



Oleh:  
Ranto P. Sihombing

## Gunakan Hak Pilih Secara Cerdas

### ■ CALEG

Sambungan dari hal. 1

Meskipun dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini, hendaknya tidak ditafsirkan sebagai eksploitasi besar-besaran tanpa memperhatikan keseimbangan. Memang tidak dapat dimungkiri, ada upaya dari pemerintah untuk mendukung kelestarian lingkungan dengan mengesahkan Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan melaksanakan dan melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Namun realitanya masih jauh dari harapan. Sebagai contoh yang mudah dilihat, hampir tiap tahun Provinsi Riau selalu mengalami gangguan asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan, setiap kali hendak membuka lahan baru. Walaupun pemerintah beralasan bahwa hampir sebagian besar lahan hutan di Provinsi Riau merupakan lahan gambut sehingga sangat sulit untuk memadamkan api bila terjadi kebakaran. Di manakah peran wakil rakyat kita dalam menyikapi hal ini?

Lebih jauh, kalau kita melihat konsep pembangunan

berkelanjutan (*sustainable development*) yang digagas kali pertama dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro Brasil tahun 1992. Yakni tegas menyimpulkan bahwa konsep pembangunan yang dilakukan hendaknya memperhatikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Bumi ini merupakan titipan anak cucu pada generasi mendatang dan bukan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya bagi pemenuhan kebutuhan saat ini. Artinya pembangunan, ekonomi dan lingkungan bukan merupakan bagian yang saling terpisahkan. Roda ekonomi tidak dapat berjalan tanpa adanya pembangunan dan pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa adanya dukungan sumber daya alam. Jangan lupa bahwa negara kita tercinta ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya.

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis berpendapat agar para calon-calon wakil rakyat yang akan duduk di Senayan maupun yang akan menjadi para wakil di daerah hendaknya lebih memikirkan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan lingkungan. Kedua, bagi para pemilih terutama pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas dengan memilih para wakil-wakil yang memahami konsep ekonomi yang berkelanjutan. Selamat berpesta demokrasi. Selamat memilih. (\*/ida/ce1)